

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Hasil identifikasi dari jumlah permintaan aktual angkutan perkotaan di Kabupaten Purwakarta sebesar 24.514 jumlah perjalanan orang/hari, dan untuk permintaan demand potensial terdapat 30.681 jumlah perjalanan orang/hari, maka untuk total jumlah perjalanan ialah 55.194 perjalanan/hari.
2. Berdasarkan hasil analisa, dari total 9 trayek angkutan perkotaan, dilakukan penyederhanaan menjadi 6 trayek, hal ini dikarenakan terdapat Trayek yang melalui jalan yang sama, yang menyebabkan presentase tumpang tindih menjadi 77% dan melampaui standar yang sudah ditetapkan.
3. Berdasarkan data eksisting yang dianalisa, terdapat kinerja jaringan dan kinerja operasional yang tidak memenuhi standar atau aturan yang ada. Frekuensi pada kondisi eksisting memiliki rata-rata 3 kend/jam, kemudian berdasarkan data rute usulan yang sudah dianalisa memiliki rata-rata 12 kend/jam. Tumpang tindih yang awalnya sebesar 77% pada kondisi eksisting, kemudian pada trayek usulan menjadi 28%. Pada trayek 08 dilakukan penataan ulang trayeknya, dikarenakan pada kondisi eksisting, angkutan perkotaan trayek 08 tidak melayani sampai titik akhir.

6.2 Saran

1. Perencanaan kinerja pelayanan angkutan perkotaan di Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan merencanakan prasarana penunjang pelayanan angkutan umum pada kantong-kantong penumpang, seperti halte yang disesuaikan dengan demand angkutan umum yang ada. Sehingga terbentuk jaringan trayek yang terintegrasi dengan kebutuhan armada yang mencukupi serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya.
2. Perlu adanya Penataan Kembali rute trayek angkutan perkotaan di Kabupaten purwakarta, agar tidak terdapat trayek yang tumpang tindihnya melebihi 50%
3. Perlu adanya Pembaruan SK trayek, untuk angkutan umum perkotaan di Kabupaten Purwakarta, yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Hal ini dikarenakan bahwa SK trayek adalah landasan hukum pengoperasian angkutan di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arni, A., Kuswandhie, R., Informasi, S., Nusantara, B., Lubuklinggau, J., Yos, J., No, S., Lubuklinggau, A. K., & Selatan, S. (2019). SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBUKAAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING. In *Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya* (Vol. 0, Issue 1).

Kebijakan Penataan Jaringan Trayek Angkutan Umum Perkotaan Jember. (n.d.).

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 687 Tahun 2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Diwilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap Teratur.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indoensia Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. (n.d.).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. (n.d.).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2013 TENTANG Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Sulistiyorini, R. (2021). *PERAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DALAM PENGEMBANGAN PROVINSI LAMPUNG.* 21(1), 55–62.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.